

POTRET PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN KESIAPANNYA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASIA (MEA)

Heri Widodo

SMKN 1 Wonosari Caruban Madiun

Abstracts: Education determines the progress of a nation to be a prosperous country. With education, the pride and civilization of a nation is easily realized. This paper is a small portrait of educational system and educational quality in Indonesia; quality of education is directly correlated to the quality of the graduated in Indonesia. Human resources in Indonesia are deeply affected by quality of education in Indonesia. The fact found that only the qualified human resources can be absorbed in work places. In line with the global live, Indonesians are parts of Asia community and world community, therefore, Indonesians are required to move on following requirement of world community. To cope the existence of “MEA” changes on education paradigm and making wisdom decisions must be done appropriately that Indonesians can be actively involved in “MEA” and they are not merely the objects of other Asia Countries.

كانت التربية مقياسا في تعيين نمو وتطور الشعب للوصول إلى كونه مجتمعا مدنيا. وبالتربية الجيدة امكانية تحقق أمنيات كون الشعب شعبا كريما ذا حضارة متقدمة. حاولت هذه المقالة عرض صورة صغيرة عن نظام التربية وجودتها في إندونيسيا، لأن جودة التربية تؤثر مباشرة على مستوى جودة الخريجين، وجودة الخريجين تؤثر في نوعية الموارد الإنسانية لدى إندونيسيا. والموارد الإنسانية الجيدة هي التي تحتاج إليها ميادين العمل. وفي جانب الحياة في عصر العولمة فإن إندونيسيا بعض من مجتمع آسيا، وبعض من المجتمعات في العالم. بهذا لا بد أن يخطو الشعب الإندونيسي مسابرة مقتضيات المجتمع العالمي المعاصر. فبوجود المجتمع الإقتصادي الآسيوي (MEA) فإن تغييرات وجهات النظر في التربية واتخاذ الموقف لمقتضيات العصر بالحكمة لا بد من القيام بها ليقدر الشعب الإندونيسي على الاشتراك في (MEA) ولأن لا تكون إندونيسيا سوقا من الأسواق لغيرها من الدول.

Kata Kunci: Kualitas pendidikan, masyarakat global, MEA

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia yang bermutu hanya dapat diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi-potensi positif yang terpendam dalam diri siswa didik. Dengan pendidikan bermutu, pendidikan menghasilkan tenaga-tenaga muda potensial yang tangguh dan siap bersaing dalam masyarakat dunia. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu pendidikan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik. Hal ini dapat dilihat dari filosofi pendidikan yang intinya adalah untuk mengaktualisasikan tiga dimensi kemanusiaan paling mendasar, yakni:

- (1) afektif yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur; (2) kognitif yang tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali ilmu pengetahuan dan mengembangkan serta menguasai teknologi; dan (3) psikomotorik yang tercermin pada kemampuan mengembangkan ketrampilan teknis dan kecakapan praktis (Depdiknas, 2005).¹

Idealisme pada pendidikan mengedepankan nilai-nilai humanisme yang mendasar sehingga dengan nilai-nilai tersebut mampu membentuk manusia-manusia yang berkualitas.

Banyak realita di lapangan yang menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya yang potensial masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi akibat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Paparan Menteri pendidikan. Anies Baswedan, yang disampaikan pada silaturahmi dengan kepala dinas Jakarta pada 1 Desember 2014, menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia berada dalam posisi gawat darurat. Beberapa kasus yang menggambarkan kondisi tersebut diantaranya adalah: “ (1) rendahnya layanan pendidikan di Indonesia, (2) rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, (3) rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia, (4) rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia.”² Secara praktis kenyataan ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia dewasa ini mengalami banyak tantangan dan masalah. Secara otomatis kondisi ini berdampak langsung dengan lulusan yang dihasilkan karena dengan rendahnya mutu pendidikan maka rendah pula kualitas lulusan yang dihasilkan.

¹ Depdiknas, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, 2005).

² Paparan Menteri pendidikan. Anies Baswedan, yang disampaikan pada silaturahmi dengan kepala dinas Jakarta pada 1 Desember 2014

Rendahnya mutu pendidikan merupakan hambatan utama bagi bangsa Indonesia untuk bisa melangkah dalam kehidupan abad 21.

Abad 21 merupakan abad pengetahuan oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan di Indonesia melangkah seiring dengan tuntutan jaman agar bangsa Indonesia tidak terlindas oleh jaman akibat ketidakberdayaannya. Untuk menyikapi ini, maka reformasi sistem pendidikan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas pendidikan.³ diakses pada 13 Oktober 2015) dengan reformasi pendidikan di Indonesia maka pendidikan di Negara ini akan membaik. UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 28 C ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.⁴ Dengan terpenuhi kebutuhan pendidikan yang baik, siswa-siswa didik tersebut akan mendapatkan manfaat dan dapat meningkatkan kualitas hidup dari pengetahuan yang dimiliki sehingga setelah menyelesaikan pendidikannya, mereka dapat memperoleh pekerjaan yang layak atau menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam UUD 1945, BAB X pasal 27 ayat 2 berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Ini berarti peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan terbuka lebar bila didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang baik.⁵ Dengan pekerjaan yang layak maka akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak pula. UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 juga menyatakan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”⁶

Di Indonesia pada kenyataannya, ketenagakerjaan masih menghadapi masalah yang kompleks, diantaranya: tingginya tingkat pengangguran, terbatasnya penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, rendahnya produktivitas pekerja/buruh serta masih belum maksimalnya penerapan UMK. Masalah ketenagakerjaan lainnya, seperti kasus pemogokan, perselisihan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), serta kasus pekerja anak, dan sebagainya, juga turut mewarnai bidang

³ (<http://edukasi101.com/innovated-pembelajaran-abad-ke-21-dan-transformasi-pendidikan>), diakses pada 13 Oktober 2015.

⁴ UUD 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 28 C ayat 1

⁵ UUD 1945, BAB X pasal 27 ayat 2

⁶ UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2

ketenagakerjaan. Belum lagi masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor rumah tangga, juga menuai banyak masalah karena minimnya pengawasan dan perlindungan. Permasalahan ketenagakerjaan memiliki dampak yang bersifat multidimensional. Untuk itu penyelesaian masalah ketenagakerjaan diarahkan untuk dilaksanakan secara sistematis dan efektif dengan tidak hanya dititikberatkan pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tetapi juga penciptaan ketenangan dan kenyamanan berusaha.

Untuk mengentas masalah SDM di Indonesia, transformasi pendidikan merupakan suatu keniscayaan karena dengan ini pendidikan manusia Indonesia seutuhnya dapat terlaksana. Dengan terlaksananya pendidikan manusia seutuhnya, pendidikan akan mampu mencetak anak-anak bangsa yang potensial dan siap berperan aktif dalam masyarakat dunia. Sebagai generasi yang potensial, empat pilar pendidikan dapat terintegrasi dalam diri mereka yang nantinya memberikan kesejahteraan bagi kehidupan mereka di masa depan. Menurut UNESCO empat pilar tersebut adalah: *learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together*.⁷

Senada dengan paparan di atas dan agar memudahkan pemahaman tentang dinamika pendidikan di Indonesia serta relevasinya terhadap dunia kerja dalam masyarakat global maka tulisan ini mengkaji tentang kesiapan dunia pendidikan di Indonesia dalam menghadapi MEA, dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: bagaimana kesesuaian antara lulusan yang dihasilkan dengan tuntutan dunia pekerjaan? apa esensi transformasi pendidikan agar pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh? Dan Bagaimana Tuntutan Kualifikasi Tenaga Kerja Menyongsong “MEA”?

Adapun tujuan dan manfaat penelitian adalah memaparkan kondisi pendidikan di Indonesia ditinjau dari segi kualitas, *outcome* yang dihasilkan, kesesuaian *outcome* dengan dunia kerja serta menggali informasi tentang karakteristik tenaga kerja potensial yang siap terjun dalam “MEA”.

KERANGKA TEORI

Pendidikan

Kemajuan sektor pendidikan dari suatu bangsa akan menentukan kemajuan pada sektor-sektor lainnya pada bangsa tersebut. Oleh karena itu pendidikan harus berkualitas dan seiring dengan perkembangan jaman. Pendidikan

⁷ Jaque Delor, Belajar: Harta Karun di Dalamnya, UNESCO, Komisi Nasional Indonesia, 1996, 64.

berkualitas mengedepankan upaya untuk memberdayakan peserta didik untuk menggali kecerdasan otak, kecerdasan hati, serta membekali keterampilan-keterampilan seperti yang dinyatakan dalam Undang Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003. Menurut Undang Undang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, pendidikan adalah:

Sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. Pendidikan merupakan suatu proses yang bermakna untuk membangun masyarakat.⁸

Dengan pendidikan, segenap potensi diri dari seorang individu akan dapat berkembang dengan baik karena segenap kompetensi yang dimiliki oleh manusia akan diolah dengan baik sehingga cita-cita mulia dari pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas; manusia yang mulia dan berkompotensi akan dapat terwujud. Hal ini senada dengan Soltis (2000) yang mengungkapkan bahwa:

Pendidikan membawa kesadaran tentang pernyataan pikiran yang diharapkan dalam perilaku yang bermoral, ini merupakan suatu proses netral berperan sebagai sarana yang berharga maka anak-anak harus dididik guna melengkapi mereka dengan pekerjaan untuk meningkatkan produktifitas dalam masyarakat.⁹

Dengan demikian, bangsa Indonesia harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Peningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif.

Tenaga Kerja di Indonesia

Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dengan kekuatannya ada pada tenaga kerja dengan kualifikasi tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tersebut tersebar dalam berbagai sector pekerjaan. Para pekerja tersebut bekerja sesuai tingkat latar belakang pendidikan yang dimiliki yang mayoritas adalah lulusan dari sekolah dasar serta sekolah menengah atas. Mereka bergerak pada pekerjaan-pekerjaan kasar yang mengandalkan kekuatan fisik

⁸ Undang Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003.

⁹ Soltis, Jonas F, *Aims of Education Teacher College Press*, (Teachers College, Columbia University, 2000).

dan menerima upah yang rendah untuk jasa yang mereka lakukan. Berdasarkan kualitasnya klasifikasi tenaga kerja adalah sebagai berikut: 1) Tenaga kerja terdidik; tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 2) Tenaga kerja terlatih: tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. 3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih: adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga.¹⁰

Transformasi Pendidikan di Indonesia

Transformasi pendidikan dapat diartikan sebagai perubahan sistem dalam pendidikan yang memberi kekuatan baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Ada tiga faktor yang menentukan proses keberhasilan dalam suatu pendidikan: 1. faktor masukan (*Raw Input*); yakni masukan mentah berupa peserta didik (siswa) yang berproses dalam (PBM), 2. faktor lingkungan (*Environmental Input*); di luar lingkungan sekolah atau berada di luar (PBM), seperti: ekologi, keluarga, masyarakat, 3. faktor *instrumental Input*; alat berupa tujuan, kurikulum, media, termasuk pendidik. Ketiga faktor tersebut nantinya mengalami proses transformasi pendidikan yang kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan *out-put* (keluaran) atau lulusan.¹¹

Secara detil, komponen transformasi pendidikan mencakup beberapa hal pokok yaitu, 1) Kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan harus menunjukkan arahan yang jelas mengenai tujuan dan target yang ingin dicapai serta cara untuk mencapainya, 2) Pengembangan kompetensi Guru, guru sebagai motor terdepan dalam perubahan harus menjadi pihak pertama yang siap dalam proses perubahan ini. 3) Teknologi, integrasi teknologi dalam proses belajar merupakan sebuah keniscayaan. 4) Riset dan evaluasi, proses pendidikan membutuhkan umpan balik dan riset untuk menyempurnakan sistem pendidikan. 5). Kurikulum, kurikulum sebagai rancangan pembelajaran harus seiring dengan tuntutan jaman.¹²

Dengan adanya sistem transformasi pendidikan di Indonesia, terjadi pembenahan pada semua komponen pendidikan yang seharusnya dilakukan secara cermat dan tepat sehingga pendidikan di Indonesia akan berkualitas.

¹⁰ <http://digilib.uinsby.ac.id/508/3/Bab%202>. diakses pada 10 Oktober 2015.

¹¹ Soedijarto, *Landasan dan arah pendidikan nasional kita*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008).

¹² <http://edukasi101.com/innovated-pembelajaran-abad-ke-21-dan-transformasi-pendidikan> diakses pada 13 Oktober 2015.

Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja

Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar ini berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan ketrampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting bagi pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.

UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹³ Dalam GBHN (BP.7 Pusat, 1990-96) butir 22 dan butir 23 sebagai arah dan kebijaksanaan umum. Butir 22 menyatakan tentang mengembangkan SDM dan menciptakan angkatan kerja Indonesia yang tangguh, mampu, dan siap bekerja sehingga dapat mengisi semua jenis tingkat lapangan kerja dalam pembangunan nasional. Selanjutnya dalam butir 23 dinyatakan tentang meningkatkan pemerataan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta memberikan perhatian khusus pada penanganan angkatan kerja.

Isi dari butir tersebut mencakup, pengadaan tenaga kerja, penyediaan kesempatan tenaga kerja, perencanaan terpadu, penyempurnaan sistem informasi untuk penyediaan dan pemasaran tenaga kerja, dan perlindungan tenaga kerja. Butir ini mengisyaratkan penataan, dan pengembangan sistem ketenagakerjaan di Indonesia agar memiliki panduan yang jelas bagi kelangsungan dunia kerja di Indonesia.

Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah salah satu bentuk pasar dunia dalam lingkup Asia. Dengan adanya MEA akan terjadi perdagangan barang, jasa, modal dan investasi yang bergerak bebas tanpa halangan secara geografis diharapkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ini menjadi merata dan menjelma menjadi pasar dunia. Kesiapan Indonesia sangat diperlukan menghadapi MEA bila tidak ingin bangsa Indonesia hanya akan menjadi pangsa pasar bagi negara ASEAN lainnya. Kesiapan Indonesia diperlukan tidak hanya pada proteksi produk dalam negeri namun juga pada sisi dunia ketenagakerjaan. Angkatan kerja yang terampil penting untuk dapat memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan ini. Tanpa komposisi angkatan kerja yang tepat dan terampil, penyatuan pasar ASEAN berpeluang menimbulkan lebih banyak masalah ketimbang kesempatan.¹⁴

¹³ UUD 1945 Pasal 27 ayat 2

¹⁴ Policy Brief, *Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia: Seberapa Responsif Terhadap Pasar Kerja?* 2014.

Keberadaan MEA memberikan dampak baik dampak positif maupun negative. Dilihat dari dampak positifnya, MEA memacu pertumbuhan investasi baik dari luar maupun dalam negeri sehingga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Sehingga penduduk Indonesia akan mendapatkan kesempatan untuk mencari pekerjaan di negara ASEAN lainnya dengan aturan yang relatif akan lebih mudah. Adapun dampak negatif dari MEA, yaitu keberadaan MEA mendorong adanya pasar barang dan jasa secara bebas. Hal tersebut akan mengakibatkan tenaga kerja asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia sehingga mengakibatkan persaingan tenaga kerja yang semakin ketat di bidang ketenagakerjaan.

Para tenaga kerja dari negara MEA yang memiliki kompetensi kerja yang lebih tinggi, tentunya akan memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi di dalam MEA. Hal inilah yang akan menjadi ujian baru bagi masalah dunia ketenagakerjaan di Indonesia sebagai suatu bangsa yang sedang berkembang dengan kualitas SDM yang rendah.¹⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potret Kualitas Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan sebuah sarana untuk membangun martabat dan peradaban manusia sebagai seorang individu yang juga merupakan bagian dari suatu komunitas. Dengan pendidikan setiap individu berproses dan berpotensi menjadi manusia yang berkualitas baik secara mental, spiritual maupun kognitif. Integrasi antara nilai-nilai luhur, nilai-nilai agama, dan aspek kognisi merupakan sinergi yang kuat dalam membentuk manusia-manusia bermartabat sehingga anak-anak bangsa tersebut mampu membangun peradaban yang maju. Masyarakat dengan peradaban yang maju salah satunya dapat dilihat dari banyaknya capaian yang telah mampu diperoleh dalam bidang akademis. .

Di Indonesia, peran pendidikan dalam membangun martabat dan peradaban manusia masih masih sebatas wacana karena dilihat dari sisi capaian dalam pendidikan masih jauh dari harapan semestinya. Menurut menteri pendidikan. Anies Baswedan, dalam silaturahmi dengan kepala dinas Jakarta pada 1 Desember 2014, bahwa pendidikan di Indonesia berada dalam posisi gawat darurat. Beberapa kasus yang menggambarkan kondisi ini diantaranya: a. 75% layanan pendidikan di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal

¹⁵ Bagus Prasetyo, "Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA". *Rechtsvinding online Journal*, 2015.

pendidikan data ini diperoleh dari (Pemetaan kemendikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012), b. Pemetaan akses dan mutu pendidikan di Indonesia pada tahun 2013-2014 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat 40 dari 40 negara. c. Sedangkan untuk pendidikan tinggi di Indonesia berada pada peringkat 49 dari 50 Negara, 4. dan untuk kemampuan literasi; dalam pemetaan sains dan matematika menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia berada pada posisi 40 dari 42 negara.

Data di atas, ini menunjukkan bahwa layanan pendidikan di Indonesia cukup rendah karena hanya 25 % layanan pendidikan di Indonesia masuk dalam kategori layak. Secara umum mutu pendidikan di Indonesia juga rendah karena Indonesia menduduki posisi akhir diantara negara-negara lainnya yaitu berada pada peringkat yang ke 40 dengan rincian sebagai berikut; pada jenjang pendidikan tinggi Indonesia berada pada posisi 49 dari 50, sedangkan pada jenjang pendidikan dibawahnya juga masih berada pada posisi bawah; Indonesia berada pada posisi 40 dari 42 negara. Jadi realitanya adalah layanan pendidikan dan mutu pendidikan di Indonesia sangat buruk serta perlu segera dibenahi agar dunia pendidikan di Indonesia tidak semakin terpuruk. Dengan terpuruknya sektor pendidikan maka secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada sektor-sektor lainnya.

Terkait dengan masalah mutu pendidikan, data dari Balitbang (2003) juga menunjukkan data bahwa dari 146.052 SD di Indonesia hanya 8 sekolah saja yang mendapat pengakuan dunia dalam kategori The Primary Years Program (PYP), dari 20.918 SMP di Indonesia hanya 8 sekolah yang mendapat pengakuan dunia sebagai The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMU hanya 7 mendapat pengakuan dunia sebagai The Diploma Program (DP).

Data dari Balitbang menegaskan bahwa mutu pendidikan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah serta masyarakat Indonesia agar semua anak-anak Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang bermutu. Tanpa pendidikan yang bermutu, lulusan-lulusan yang dihasilkan tentu tidak bermutu juga.

Dengan rendahnya layanan pendidikan dan mutu pendidikan, akan sulit bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas. Rendahnya kualitas lulusan tentu menghambat perubahan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang bermartabat dan memiliki peradapan yang maju.

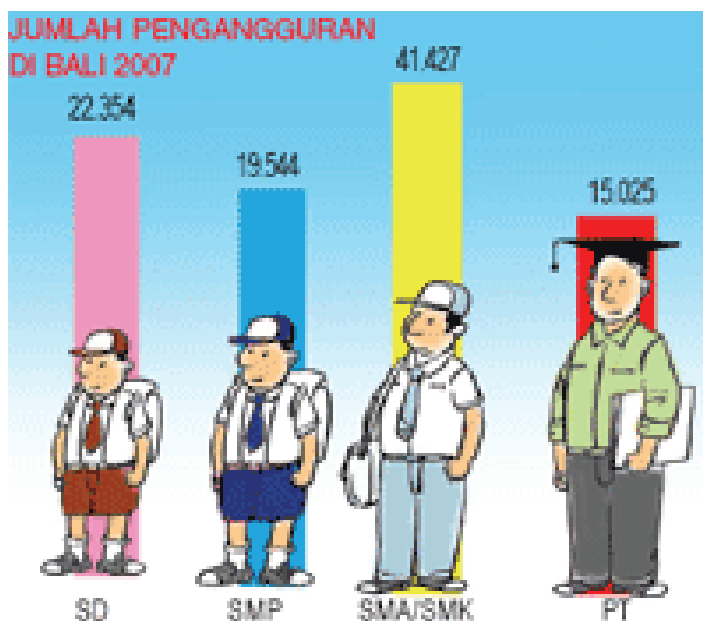
Kesesuaian Lulusan dengan Tuntutan Dunia Pekerjaan

Permasalahan SDM di Indonesia menjadi semakin kompleks terindikasi dengan banyaknya lulusan –lulusan pendidikan formal dari berbagai jenjang yang tidak terserap dalam dunia kerja. disebabkan oleh banyak faktor diantaranya;

1) jumlah penduduk yang semakin hari semakin bergejolak, 2) pertumbuhan angkatan kerja lebih besar ketimbang ketersediaan lapangan kerja, 3) distribusi penduduk antar daerah tidak merata, 4) ketidaksesuaian kompetensi SDM dengan pasar kerja, distribusi informasi tentang pasar kerja yang lambat atau timpang, tingginya tingkat pengangguran.¹⁶

Kondisi ini menghambat lajunya penyerapan tenaga kerja baik mereka yang berlatar belakang pendidikan SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi. Tingkat pengangguran tertinggi ada pada penduduk berlatar belakang SMA sebanyak 41,427 %, SD sebanyak 22,354%, SMP sebanyak 19,544%, dan Perguruan Tinggi sebanyak 15,025%, lihat pada tabel. 2.2.1

Tabel. 2.2.1. Jumlah Pengangguran di Bali 2007



Berdasarkan table di atas, ini menunjukkan bahwa terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja menimbulkan adanya pengangguran pada usia kerja dari berbagai latar belakang tingkat pendidikan.

Selanjutnya, menjadi pertanyaan yang serius juga antara kesesuaian lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja di Indonesia bila dilihat dari capaian para lulusan pendidikan tinggi Indonesia dalam dunia kerja apabila banyak dari

¹⁶ <http://radarbandung.id/index.php/detail/2865/pendidikan-harus-match-dengan-industri>, diakses pada 7 Oktober 2015)

lulusan perguruan tinggi di Indonesia yang bekerja diberbagai sektor dengan pertumbuhan yang lambat.¹⁷ Ini menunjukkan adanya mata rantai yang putus antara pendidikan tinggi dan dunia kerja. Perguruan tinggi belum mampu menghasilkan lulusan dengan harga jual yang tinggi berbekal dengan ilmu yang telah dipelajari meskipun secara umum lulusan pendidikan tinggi memiliki peluang kerja lebih besar dibanding lulusan tingkat SMA, SMP, ataupun SD.

Transformasi Pendidikan dalam Mencetak SDM yang Professional

Transformasi pendidikan di Indonesia adalah sebuah sistem untuk membangun kembali ruh pendidikan di Indonesia agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional Indonesia diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia yang religius dan bermoral, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, dan berkepribadian dan bertanggung jawab.¹⁸

Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang berbasis pada penguasaan pengetahuan, penguasaan keterampilan, serta pembentukan karakter yang unggul. Oleh karena itu pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat abad 21. Oleh karena itu transformasi pendidikan harus ditekankan.

Gambar.2.3.1. Pendekatan Sistemik Transformasi Pendidikan



Transformasi dalam pendidikan Indonesia mencakup:

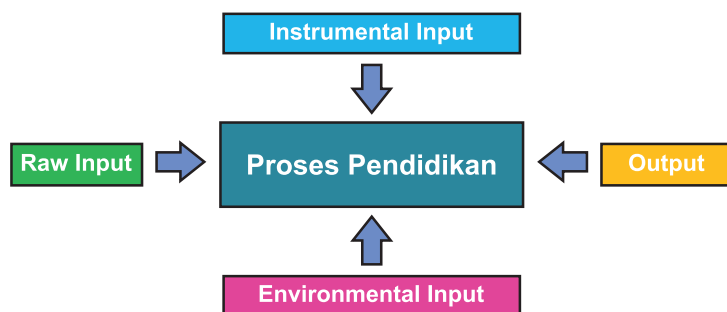
1. Kebijakan pendidikan, pendidikan di Indonesia harus mengarah pada pola pembelajaran abad 21 yang lebih berpusat pada siswa.

¹⁷ Policy brief , 2014: 7

¹⁸ Soedijarto, 2008 118

2. Pengembangan kompetensi guru, guru harus mengubah proses pembelajaran dari tradisional yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa.
3. Teknologi, pembelajaran harus berbasis teknologi; terjadi integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar.
4. Riset dan evaluasi, kegiatan ilmiah berupa riset harus memiliki porsi besar. Setiap proses ilmiah diberikan tindak lanjut sehingga pendidikan selalu dalam kondisi aktual dalam pengembangan dunia pendidikan.
5. Kurikulum, Penerapan kurikulum K-13 yang berbasis scientific approach merupakan langkah awal yang tepat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar menghasilkan lulusan yang berkualitas meskipun kurikulum ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan terutama pada asesmennya.¹⁹

Gambar 2.3.2 Proses Transformasi Pendidikan



(Satmoko, 1996:88)

Bagan diatas merupakan konsep dari proses transformasi pendidikan. Siswa didik adalah raw input. Selanjutnya raw input ini akan diproses dengan menggunakan model pembelajaran abad 21 dimana siswa adalah pusat dalam proses pembelajaran, dukungan dari instrumental input seperti tujuan pendidikan, kurikulum, guru sangat berkontribusi ditopang oleh lingkungan yang mendukung seperti keluarga, masyarakat. Sinergi dari instrumental input, environmental input, proses pendidikan terhadap raw input akan menghasilkan out put yang berkualitas.

¹⁹ <http://edukasi101.com/innovated-pembelajaran-abad-ke-21-dan-transformasi-pendidikan> diakses pada 13 Oktober 2015.

Kualifikasi Tenaga Kerja Menyongsong MEA

Banyak pihak masih meragukan bahwa liberalisasi sektor jasa ASEAN seiring dengan diterapkannya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 akan menguntungkan Indonesia, khususnya para pekerja Indonesia. Secara kualitas jumlah tenaga kerja terdidik di Indonesia adalah 33.1% sedangkan jumlah tenaga kerja kurang terdidik hampir dua kali dari jumlah tenaga terdidik yaitu 66.9%. Ini menunjukkan bahwa secara kualitas SDM Indonesia masih rendah karena tingka usia kerja berpendidikan rencah masih cukup tinggi, lihat pada tabel 2.4.1

Tabel.2.4.1 Tenaga Kerja di Indonesia dari Tahun 2002 – 2012

Pendidikan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kurang Terdidik	77.7%	76.8%	76.3%	75.8%	75.6%	74.9%	73.5%	71.1%	69.4%	68.3%	66.9%
≥ SD	60.9%	56.7%	56.5%	56.2%	55.6%	54.6%	54.5%	52.8%	50.4%	49.4%	48.6%
SLTP	16.7%	20.1%	19.8%	19.5%	20.0%	20.3%	19.0%	18.5%	19.1%	18.9%	18.2%
Terdidik	22.3%	23.2%	23.7%	24.2%	24.4%	25.1%	26.5%	28.9%	30.6%	31.7%	33.1%
SMU/SMK	17.6%	18.6%	18.4%	18.8%	18.8%	19.1%	10.2%	21.8%	22.9%	23.7%	24.1%
Akademi/Diploma	2.1%	1.9%	2.2%	2.3%	2.3%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	2.7%
Universitas	2.6%	2.7%	3.0%	3.3%	3.3%	3.6%	3.7%	4.4%	4.8%	5.2%	6.3%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa kekuatan tenaga kerja di Indonesia adalah tenaga kerja kurang terdidik dan bukan pada tenaga kerja terdidik. Bila menyimak pada data tersebut maka keberadaan MEA tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia karena aspek keterbatasan dalam aspek SDM . Hal yang perlu menjadi catatan penting adalah dengan berlakunya MEA juga telah terjadi kesepakatan bahwa ada 8 bidang ketenagakerjaan atau profesi yang dibuka untuk pasar masyarakat ASEAN. Bidang-bidang tersebut yaitu: insinyur, arsitek, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi, dan akuntan.²⁰ Artinya dengan kesepakatan ini seluruh masyarakat ASEAN bisa bekerja di Negara manapun dalam kawasan ASEAN selama memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh masing-masing asosiasi dari 8 profesi tersebut.

Contoh kasus: seorang insinyur Indonesia bisa bekerja di Singapura atau Malaysia dengan ketentuan bahwa SDM Indonesia disamakan dengan kualitas SDM insinyur yang ada di Singapura, atau Malaysia, acuan yang dipakai adalah kualitas pendidikan yang menjadi faktor utama. Secara umum universitas-universitas di Singapura dan Malaysia menghasilkan sarjana teknik yang sebagian besar telah berstandar internasional ABET, sementara di Indonesia, hanya ada

²⁰ Media Indonesia, Kamis, 27 Maret 2014.

satu perguruan tinggi yang telah memperoleh sertifikat akreditasi perguruan tinggi ABET tersebut yaitu Institut Teknologi Bandung dan itu pun hanya di jurusan Teknik Elektronika saja yang telah berstandar ABET (Keliat dan Astra dkk, 2013).²¹

Lebih lanjut agar seorang insinyur profesional bisa berpraktik di suatu negara maka harus memperoleh gelar ACPE (ASEAN Chartered Professional Engineer). Untuk memperoleh gelar ini terdapat beberapa ketentuan, antara lain mencakup: 1. Telah menyelesaikan pendidikan tinggi bidang keinsinyuran, 2. Mendapatkan izin (lisensi) dari otoritas profesi nasional untuk berpraktik mandiri, 3. Memiliki pengalaman kerja 7 tahun, 2 tahun di antaranya adalah pengalaman kerja di bidang keinsinyuran, 4. Sejalan dengan kebijakan Continuing Professional Development (CPD) dengan tingkat yang memuaskan, 5. Memperoleh sertifikat dari badan penyelenggara nasional dan tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum.²²

Dari paparan contoh diatas menunjukkan bahwa tuntutan SDM yang terampil dan berkualitas merupakan syarat mutlak agar bangsa Indonesia tidak hanya menjadi pangsa pasar bagi negara-negara ASEAN lainnya namun ikut serta sebagai pelaku utama dalam ajang pasar dunia.

PENUTUP

Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya: 1. Rendahnya sarana fisik, 2. Rendahnya kualitas guru, 3. Rendahnya kesejahteraan guru, 4. Rendahnya prestasi siswa, 5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, 6. Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, 7. Mahalnya biaya pendidikan.

Dunia pendidikan mulai membangun mata rantai dengan dunia kerja/ merespon dunia kerja sehingga lulusan yang dihasilkan sesuai dengan tuntutan dunia kerja; paradigma ini harus dipahami dan dibangun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Transformasi pendidikan diperlukan agar pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan tangguh; pendidikan dan tenaga pendidik harus ditingkatkan (kualitasnya sebagai pendidik diiringi dengan memberi kesejahteraan bagi pendidik = ditata secara profesional). MEA menuntut tenaga-tenaga kerja yang terampil dan profesional. Kegiatan-

²¹ Keliat dan Astra, "Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia Dan Liberalisasi Jasa ASEAN", Laporan Penelitian ASEAN Study Center Universitas Indonesia Bekerja Sama Dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013.

²² Ibid

kegiatan keterampilan, kewirausahaan pelatihan-pelatihan kerja lebih digalakkan untuk menyokong perbaikan kualitas tenaga kerja yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Delor, Jaque, *Belajar: Harta Karun di Dalamnya*. UNESCO, Komisi Nasional Indonesia, 1996.
- Depdiknas, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005-2009*. Jakarta: Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, 2005.
- GBHN (BP.7 Pusat, 1990-96)
- Jujun S, Sumantri, *Filsafat Ilmu sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Keliat dan Astra, *Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia Dan Liberalisasi Jasa ASEAN*, Laporan Penelitian ASEAN Study Center Universitas Indonesia Bekerja Sama Dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2013.
- Kualitas tenaga kerja*. <http://digilib.uinsby.ac.id/508/3/Bab%202>, diakses pada 10 Oktober 2015.
- Paparan Menteri Pendidikan. Anies Baswedan, yang disampaikan pada silaturahmi dengan kepala dinas Jakarta pada 1 Desember 2014.
- Pembelajaran abad 21. <http://edukasi101.com/innovated-pembelajaran-abad-ke-21-dan-transformasi-pendidikan>, diakses pada 13 Oktober 2015.
- Pendidikan dan dunia industry*. <http://radarbandung.id/index.php/detail/2865/pendidikan-harus-match-dengan-industri>, diakses pada 7 Oktober 2015.
- Satmoko, *Landasan Kependidikan*, Semarang: IKIP Semarang. Press, 1996.
- Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008.
- Soltis, Jonas F, *Aims Of Education Teacher College Press*. Teachers College, Columbia University, 2000.
- Undang Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.